

CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN

Peran Pendidikan Karakter dalam Rangka Meningkatkan Kecerdasan Emosi Mahasiswa

Peran Keluarga dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan

Pembelajaran sebagai Pemberdayaan Diri

Enhancing Students' Comprehension in Grammar by Using Hotpotatoes 6

Budaya Politik Indonesia dan Kewarganegaraan

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat melalui Optimalisasi Fungsi Partai Politik

Hubungan Pendidikan Karakter dengan Kecerdasan Emosional (EQ)

Meningkatkan Kemampuan Berfikir Mahasiswa dengan Menggali Potensi Diri melalui

Pertanyaan atau Gagasan Tertulis dan Memecahkan Masalah Sendiri secara Kelompok

Analisis Perilaku Siswa Kelas IV SD dalam Memecahkan Soal Cerita Matematika

Berdasarkan Tahapan Analisis Kesalahan *Newman*

Implementasi Pembelajaran *Questioning & Claryfying*
untuk Meningkatkan Pemahaman Matakuliah Geometri

Implementasi Kemandirian Belajar dan Prestasi Belajar Mahasiswa

Stylistic Aspect in Scott Peck's in Heaven as On Earth

Penerapan Pembelajaran Terpadu *Guided Exploration-Connecting* pada Mahasiswa
pada Materi Trigonometri dalam Pemecahan Masalah

The Predictibility of the Students' Intelligence Quotient,
and the National Examination

Scores to the Students' English Achievement at SMA

Pembelajaran Pemecahan Masalah pada Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
bagi Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Kadeni

Wakil Ketua Penyunting

Syaiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

R. Hendro Prasetianto

Udin Erawanto

Riki Suliana

Prawoto

Penyunting Ahli

Miranu Triantoro

Masruri

Karyati

Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha

Yunus

Nandir

Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi: STKIP PGRI Blitar, Jalan Kalimantan No. 49 Blitar, Telepon (0342)801493. Langganan 2 nomor setahun Rp 50.000,00 ditambah ongkos kirim Rp 5.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua:** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua:** M. Khafid Irsyadi, ST.,S.Pd

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

CAKRAWALA PENDIDIKAN**Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan**

Volume 15, Nomor 1, April 2013

Daftar Isi

Peran Pendidikan Karakter dalam Rangka Meningkatkan Kecerdasan Emosi Mahasiswa <i>Ekbal Santoso</i>	1
Peran Keluarga dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan <i>Endang Wahyuni</i>	10
Pembelajaran sebagai Pemberdayaan Diri <i>Kadeni</i>	17
Enhancing Students' Comprehension in Grammar by Using Hotpotatoes 6 <i>M Ali Mulhuda</i>	22
Budaya Politik Indonesia dan Kewarganegaraan <i>M. Syahri</i>	27
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat melalui Optimalisasi Fungsi Partai Politik <i>Miranu Triantoro</i>	41
Hubungan Pendidikan Karakter dengan Kecerdasan Emosional (EQ) <i>Udin Erawanto</i>	49
Meningkatkan Kemampuan Berfikir Mahasiswa dengan Menggali Potensi Diri melalui Pertanyaan atau Gagasan Tertulis dan Memecahkan Masalah Sendiri secara Kelompok .. <i>Agus Budi Santosa</i>	58
Analisis Perilaku Siswa Kelas IV SD dalam Memecahkan Soal Cerita Matematika Berdasarkan Tahapan Analisis Kesalahan <i>Newman</i> <i>Enditiyas Pratiwi</i>	67
Implementasi Pembelajaran <i>Questioning & Claryfying</i> untuk Meningkatkan Pemahaman Matakuliah Geometri Transformasi <i>Kristiani dan Cicik Pramesti</i>	74
Implementasi Kemandirian Belajar dan Prestasi Belajar Mahasiswa <i>Masruri</i>	83
Stylistic Aspect in Scott Peck's in Heaven as On Earth <i>R. Hendro Prasetyanto</i>	88
Penerapan Pembelajaran Terpadu <i>Guided Exploration-Connecting</i> pada Mahasiswa pada Materi Trigonometri dalam Pemecahan Masalah <i>Riki Suliana</i>	97
The Predictibility of the Students' Intelligence Quotient, and the National Examination Scores to the Students' English Achievement at SMA <i>Saiful Rifa'i</i>	106
Pembelajaran Pemecahan Masalah pada Sistem Persamaan Linear Dua Variabel bagi Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah..... <i>Suryanti</i>	121

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 10–20 halaman, dan diserahkan paling lambat 3 bulan sebelum penerbitan, dalam bentuk ketikan di atas kertas sebanyak 2 eksemplar dan pada disket komputer IBM PC atau kompatibel. Berkas naskah pada disket komputer diketik dengan menggunakan pengolah kata *Microsoft Word*.
2. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tinjauan buku baru.
3. Semua karangan ditulis dalam bentuk *esai*, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul sub-bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut.

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri)

4. Artikel konseptual meliputi (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak (50–75 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/pembahasan (terbagi atas sub-subjudul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, (b) nama (-nama) peneliti, (c) abstrak, (d) kata kunci, (e) identitas peneliti (tanpa gelar akademik) (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan, (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
5. Daftar rujukan disajikan mengikuti tatacara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problems and Prospects for the Decades Ahead: Competency Based Teacher Education*. Berkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto. 1988. *Pengaruh Penginformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG..

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Black & A. Lucas (Eds.). *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge.

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 1(1):45–52.

6. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (Depdikbud, 1987).

MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK

Miranu Triantoro
STKIP PGRI Blitar
mir.stkip@gmail.com

Abstrak: Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik merupakan elemen kunci dan roh dari sistem demokrasi yang harus menjadi pilar dalam melakukan perubahan sosial dan/atau pembangunan, karena melalui keterlibatannya masyarakat ikut bertanggung jawab secara moral dan sosial terhadap segala kebijakan dan keputusan yang diambil terkait dengan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai politik merupakan salah satu pihak yang memiliki peran besar dalam menjalankan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Terdapat empat fungsi partai politik yang apabila dilakukan secara efektif benar-benar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Keempat fungsi partai politik itu meliputi (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (*political socialization*), (3) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (4) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam realitanya sebuah partai politik yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik akan meningkatkan elektabilitas partai dan menumbuhkan kepercayaan terhadap perkembangan demokrasi.

Kata kunci: partisipasi politik masyarakat dan fungsi partai politik.

Abstract: Public participation in political life is key element and the spirit of democratic system that should be a pillar in doing social change and or social development, because by their involvement in political life, they will be responsible morally and socially to all policies and decisions related to the system of social life, state and nation. A political party is a party that has a major role in its function in increasing public participation in politics. There are four functions of political parties, which, if done effectively, it really can increase public participation. They are as follows, (1) a means of political communication, (2) political socialization, (3) a means of political recruitment, and (4) conflict management. If a political party can realize its function effectively, it will improve its electability in society and make democracy grows well.

Key words: public political participation and function of political party.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pesta demokrasi yang berupa pemilihan umum baik untuk lembaga legislative (anggota-anggota DPR, DPRD maupun DPD) yang akan dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden masih

akan dilaksanakan ditahun 2014, namun demikian memasuki bulan kedua di tahun 2013, suasana perpolitikan di Indonesia sudah terasa “hangat”, jika kita mencermati berbagai peristiwa yang melibatkan berbagai partai politik peserta pemilu yang saling memasang

dan menerapkan strategi pencitraan di samping berusaha untuk saling menjatuhkan pamor dan kekuatan riil masing-masing partai politik dengan mengusung issue-issue korupsi yang melibatkan berbagai tokoh partai politik. Misalkan saja bagaimana Partai Demokrat (sebagai partai Pemerintah) terus di goyang oleh berbagai kasus korupsi yang melibatkan berbagai fungsionarisnya, mulai bendahara umum Muhammad Nazarudin yang akhirnya secara berkelanjutan menggelandang “Angelina Sondakh”, Sang Menteri Pemuda dan Olah Raga “Andi Malarangeng” yang menyebabkan semakin terpuruknya elektabilitas partai, yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah-langkah berupa 8 (delapan) solusi untuk mengangkat citra partai, yang salah satunya adalah memberikan “kesempatan” kepada Anas Urbaningrum yang banyak disebut oleh berbagai pihak terlibat dalam berbagai kasus korupsi proyek wisma atletik maupun hambalang, sementara waktu diberikan kesempatan untuk mengkonsentrasikan dirinya dalam kasus hukum yang menjerat dirinya yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun di dalam pernyataannya tidak ada kata-kata untuk “menonaktifkan” dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tetapi secara politik, Anas Urbaningrum sudah tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan roda Partai Demokrat yang telah membesarkan namanya. Hal yang justru mengejutkan banyak pihak adalah kenapa setelah Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kesempatan kepada Anas untuk berkonsentrasi ke ranah hukum, pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013 secara legal formal Anas Urbaningsrum ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus Hambalang, sehingga terkesan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, telah mengetahui sebelumnya. Adakah hal ini terkait dengan tragedi bocornya sprindik (Surat Perintah Penyidikan) dari KPK atau ada konfigurasi politik di tingkat elit atau masih banyak lagi nuansa-nuansa yang melatarbelakanginya? Semoga pertanyaan-pertanyaan masyarakat dapat segera terjawab

seiring dengan berjalannya kasus ini di pengadilan.

Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera telah tercemar dengan ditangkapnya “Presiden PKS” Hassan Lutfi dalam kasus Suap “Import Daging” yang sekarang juga dijadikan sebagai “sasaran tembak” Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga paska pengundurannya, partai segera mengambil tindakan penyelamatan dengan mengangkat dan/atau memilih presiden partai yang baru yaitu “Anis Matta” sebagai penanggung-jawab dan pemegang nahkoda partai. Bahkan sesuatu yang sangat mengejutkan adalah pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta penanggungjawab “tragedi Lumpur Lapindo” untuk segera menyelesaikan problematika sekitar “ganti rugi” terhadap para korban lumpur lapindo, yang secara tidak langsung merupakan upaya untuk “menohok” Partai Golkar, karena Abu Rizal Bakri (ARB) sang Ketua Umum Golkar yang rencana diusung oleh Partai Golkar sebagai Calon Presiden 2014 s.d 2019, merupakan salah satu “pemilik” dari perusahaan yang bisa menyebabkan semburan lumpur di Sidoarjo.

Berbagai fakta tersebut di atas menggambarkan betapa rendahnya moralitas para wakil-wakil rakyat atau orang-orang yang sudah dipercaya oleh masyarakat dalam memegang tampuk pemerintahan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Apalagi jika melihat berbagai fakta yang ada di gedung DPR/MPR, dimana banyak para wakil rakyat yang “membolos” dari sidang-sidang DPR, bahkan pelaksanaan sidang ditunda dengan alasan jumlah peserta tidak memenuhi quorum yang ditentukan, sungguh sangat memalukan dan ironi sekali, sebagai seorang anggota dewan yang terhormat mewakili rakyat menjadi “penghianat amanat rakyat”, karena mereka hanya mengutamakan “harta”, jabatan dan kekuasaan belaka, tidak didasari oleh tingginya moralitas, etika dan akhlak yang baik. Oleh karena itulah wajar jikalau banyak masyarakat yang bersifat apriori terhadap anggota DPR, DPRD maupun DPD dan bahkan Pemerintah yang telah diberikan tugas untuk memegang amanat yang telah

diberikannya. Masyarakat cenderung apatis dan tidak peduli dengan berbagai kegiatan politik yang seharusnya menjadi hak mereka untuk ikut menentukan nasib bangsa dan Negara dalam sebuah Negara demokrasi. Sebagai sebuah bahan renungan cobalah kita simak dari berbagai pemilihan kepala daerah tingkat I maupun II selama tahun 2012- 2013 prosentase masyarakat yang Golput; Aceh yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur pada hari Senin tanggal 9 April 2012 jumlah masyarakat yang tidak mempergunakan hak pilihnya sejumlah 24, 27 %; Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada putaran pertama jumlah masyarakat yang tidak mengrgunakan hak pilihnya sebanyak 2.555.207 (37%) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap tercatat 6.962.348 orang; sedangkan pada pemilihan putaran kedua dengan jumlah pemilih yang meningkat (dalam DPT sebesar 6.996.951) jumlah warga Jakarta yang tidak menggunakan hak pilihnya menjadi menurun 4 % menjadi 33 % . Sedangkan dalam tataran pemilihan kepala daerah tingkat II (kabupaten/kota) dapat diberikan contoh berikut: (1) pemilukada kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan pada tanggal 10 Nopember 2012 menembus angka 29 % .(2) Pemilukada Bangkalan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2012 angka Golput sebesar 41,50 %, (3) Pemilukada di kabupaten Nganjuk sebesar 40 %; Sedangkan untuk Pemilukada di Tulungagung yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2013 jumlah warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) sebesar 290.000 atau (33%). Berbagai angka golput tersebut menunjukkan angka yang cukup fantastic sebagai suatu Negara yang menyelenggarakan perhelatan dalam pemilihan seorang pemimpin yang bersifat demokratis.

Apatisme masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam bidang pemerintahan dan atau politik tersebut jika tidak diperhatikan dengan secara seksama, maka roh demokrasi yang menjadi nafas kehidupan bangsa kita semakin pudar, yang berarti pula fondasi pembangunan bangsa menuju tatanan masyarakat yang bermartabat menjadi rapuh. Oleh karena itu semua pihak, khususnya para politisi, pe-

megang tampuk kekuasaan, para pemerhati perkembangan kehidupan bangsa, para tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kepedulian masyarakat terhadap tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pelaksanaan tatanan pemerintahan benar-benar diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Dengan memiliki partisipasi yang tinggi dalam bidang politik dan/atau pemerintahan diharapkan pembangunan benar-benar mendapat respon yang baik, mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dengan berbagai bentuk kontri-businya, disamping adanya control social yang memadahi dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar ,mengacu dan berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak.

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Konsepsi masyarakat Indonesia yang pluralis, yang terdiri dari berbagai ragam budaya, adat-istiadat, agama, kepercayaan telah membawa keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia, apalagi jika melihat kondisi geografi Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan dan berada di posisi silang dua benua dan dua samodra, menandakan akan arti pentingnya sebuah kebersamaan dalam keanekaragaman, sehingga secara filosofis semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan perisai yang sangat ampuh untuk mengatasi keanekaragaman yang ada di dalamnya.

Dengan memperhatikan berbagai fenomena pluralism yang ada, maka upaya untuk melibatkan seluruh potensi masyarakat merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar sejalan dengan prinsip Negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai unsur utama dalam sebuah system pemerintahan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan demikian rakyat atau masyarakat suatu bangsa secara keseluruhan memiliki tanggung jawab

moral yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dengan lingkungan dimana seseorang itu berada. Salah satu partisipasi masyarakat yang semakin mengalami perkembangan dalam sebuah sistem pemerintahan adalah bagaimana seseorang individu memiliki keterlibatan dalam menentukan dan memilih para anggota legislative maupun eksekutif baik secara langsung maupun tidak langsung.

Makna Partisipasi Politik

Partisipasi politik pada hakekatnya merupakan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah kegiatan-kegiatan politik, baik yang menyangkut urusan-urusan Negara, pengambilan sebuah keputusan (decision making), kebijakan (policy), pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Keikutsertaan masyarakat dalam sebuah kegiatan-kegiatan politik dan kenegaraan ini disamping merupakan salah satu ciri Negara demokrasi, juga sekaligus menjadi tolok ukur seberapa besar tanggungjawab masyarakat dalam membangun bangsanya, karena sebuah perubahan sosial (pembangunan) tidak akan mungkin dapat terjadi tanpa pelibatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Meriam Budiardjo (2005,161) dalam bukunya “Dasar-dasar Ilmu Politik” telah mengemukakan bahwa kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Menurut beliau partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Sedangkan Michael Rush dan Phillip

Althoff (2005, 23) dalam bukunya “Pengantar Sosiologi Politik” mengemukakan, bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aktivitas politik dapat bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya, adanya perbedaan tingkat partisipasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka yang menjadi indikator terjadinya partisipasi politik adalah adanya keterlibatan seorang anggota masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok dalam sebuah tatanan politik, diantaranya adalah mempergunakan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan anggota legislative maupun eksekutif (pemilihan anggota DPR, DPRD, Presiden, Gubernur maupun Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kotamadya, maupun yang lainnya); menjadi anggota dalam sebuah organisasi sosial politik (partai politik, kelompok kepentingan/interest Group, kelompok penekan/pressure group); ikut ambil bagian secara aktif dalam sebuah pertemuan-pertemuan atau dialog-dialog dengan berbagai pihak, terutama dengan para pembuat kebijakan, sehingga mampu mempengaruhi hasil keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tata kehidupan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian maka partisipasi politik sebenarnya tidak hanya sekedar melibatkan warga masyarakat dalam tahapan-tahapan awal penentuan kebijakan, akan tetapi setelah kebijakan ditetapkan atau diputuskan masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan control social/pengawasan sosial terhadap pelaksanaan dari sebuah kebijakan.

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat merupakan elemen kunci dari sebuah perubahan sosial dan pembangunan masyarakat, karena dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat disamping dapat membelajarkan masyarakat untuk senantiasa bertanggungja-

wab terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraannya baik secara individu dan kelompok, sekaligus dapat diketahui harapan-harapan dan keinginan-keinginan melalui keterlibatan masyarakat dapat diketahui harapan-harapan dan keinginan yang ada seiring dengan situasi dan kondisi riil yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff (2005, 121-122) ada berbagai bentuk partisipasi politik yang bersifat herachis didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi, yakni: (1) menduduki jabatan politik atau administrative, (2) mencari jabatan politik atau administrative, (3) keanggotaan aktif suatu organisasi politik, (4) keanggotaan pasif suatu organisasi politik, (5) keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik/quasi political, (6) keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik/quasi political, (7) partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya, (8) partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, dan (9) voting / pemberian suara. Keberadaan berbagai bentuk partisipasi politik yang mendasarkan pada herarchi di atas bukan berarti herarchis yang bawah menjadi prasarat bagi berkembangnya partisipasti masyarakat di atasnya. Tetapi hanya sekedar memberikan cakupan berbagai jajaran partisipasi politik yang dapat diterapkan dalam semua tipe system politik yang ada.

Berbeda dengan pandangan tersebut di atas, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990, 9-10) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi 5 (lima), yaitu: (1) *Kegiatan Pemilihan*; yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu; (2) *Lobby*; yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu; (3) *Kegiatan Organisasi*; yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah; (4) *Contacting*; yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi kepu-

tusan mereka, dan (5) *Tindakan Kekerasan (violence)*; yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat tersebut, hakekat intinya adalah bahwa setiap bentuk partisipasi politik mengarah kepada bagaimana sebuah kebijakan atau keputusan yang mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi.

Partai Politik

Hakekat Partai Politik

Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik secara tegas telah memberikan batasan tentang partai politik sebagai berikut:

“Partai politik adalah *organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. (pasal 1)

Sejalan dengan itu Miriam Budiardjo (2005, 60-61) mengemukakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggoanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Berdasarkan batasan tersebut dapat dikemukakan bahwa sebuah partai politik merupakan sebuah organisasi politik yang dengan sengaja dibentuk oleh sekelompok orang yang memegang teguh sebuah ideologi tertentu dan

mempunyai sebuah tujuan yang telah disepakati bersama oleh orang-orang yang membentuknya.

Fungsi Partai Politik

Keberadaan partai politik sebagai sebuah organisasi yang dibentuk dalam rangka menyiapkan anggota masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan sine qua non (sesuatu yang seharusnya) dilakukan dalam mengembangkan tata kehidupan demokrasi di sebuah negara berkembang seperti negara Indonesia. Oleh karena itulah banyak diantara para pakar politik yang berusaha untuk memberikan pandangannya mengenai fungsi-fungsi partai politik yang dapat dikembangkan dalam menjaga elektabilitas partai politik yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang No. 2 tahun 2008, fungsi partai politik secara eksplisit telah dicantumkan dalam pasal pasal 11 ayat 1, yang jika dirinci adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. (3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (2005, 163) fungsi-fungsi tersebut dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu: (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (*political socialization*), (3) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (4) pengatur konflik (*conflict management*). Sarana komunikasi politik artinya menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat

berkurang; sebagai sarana sosialisasi politik, artinya sebagai suatu proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Sebagai sarana rekrutmen politik, artinya berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Sedangkan fungsi sebagai sarana pengatur konflik artinya bahwa dalam suasana demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya.

UPAYA MENGOPTIMALKAN FUNGSI PARTAI SEBAGAI LANGKAH PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik merupakan suatu keharusan dan tidak bisa ditinggalkan jika mengharapkan pembangunan politik bangsa benar-benar mencerminkan dan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, karena melalui keikutsertaan dalam politik inilah warga masyarakat dapat ikut andil dalam mewarnai sebuah kebijakan politik, baik ketika dalam tahap perencanaan program atau pembuatan keputusan, pelaksanaan kebijakan atau bahkan sampai dengan proses penilaian atau monitoring terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Hal inilah yang sebenarnya menjadi hakekat dari berdirinya sebuah partai politik, sebagaimana dikemukakan oleh Ichlasul Amal (2012,xv):

“Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, member jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abash (legitimate) dan damai”

Dalam tata kehidupan perpolitikan yang masih “mencari bentuk” seperti di Indonesia saat ini, maka setiap partai politik seyogyanya mampu untuk menjalankan fungsinya dengan

baik, sehingga harapan-harapan masyarakat yang dicurahkan lewat partai dapat direalisasikan dan jauh dari kekecewaan. Sekaligus merupakan cermin dari kemampuan partai dalam menjalankan fungsi dan garis partai.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan sejalan dengan fungsi-fungsi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik hendaknya mampu untuk menjalin hubungan yang baik dengan warga masyarakat/audien, karena melalui hubungan yang baik dan harmonis, penyampaian pesan dapat dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini masyarakat luas dapat menyampaikan tuntutan-tuntutan atau aspirasinya kepada partai politik dan sebaliknya partai politik, tidak hanya sekedar menampung aspirasi tersebut tetapi harus mampu menyalurkan aspirasi tersebut ke lembaga penentu kebijakan. Apabila masyarakat benar-benar merasa aspirasinya dapat tersalurkan secara otomatis tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat dan berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam politik.

Sebagai sosialisasi politik

Sosialisasi politik ini terkait dengan kemampuan partai politik dalam memasyarakatkan ide-ide, visi, misi dan program-program partai politik terkait dengan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, partai politik harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan reaksi-reaksi positif pada masyarakat, dengan memaparkan berbagai kebijakan-kebijakan penting yang telah diperjuangkan dan diambil melalui berbagai media yang ada, baik media antar pribadi maupun melalui media massa. Fungsi partai politik sebagai sarana politik ini lebih mengarah kepada bagaimana mewujudkan dan meningkatkan kesadaran warga Negara terutama bagi generasi muda dalam bidang politik kenegaraan, sehingga mereka sadar akan hak

dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen merupakan fungsi partai yang sangat penting dan banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat yang menjadi konstituen dari kehidupan kepartaian/sistem politik, karena melalui rekrutmen yang tepat akan dapat diperoleh pemimpin-pemimpin yang benar-benar dapat diandalkan dalam menjalankan amanah masyarakat yang disalurkan melalui partai-partai politik kepercayaan. Untuk itu setiap partai politik diharapkan mampu melakukan proses pengkaderan secara tepat dan menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan kapasitas kepribadian dan kemampuannya. Ketidakmampuan sebuah partai dalam menyelenggarakan proses pemilihan dan penentuan seorang kader dalam sebuah jabatan-jabatan penting/strategis akan mengakibatkan partai yang bersangkutan akan ditinggalkan oleh konstituennya yang berarti pula tingkat partisipasi masyarakat akan menjadi rendah. Demikian pula dengan tingkat elektabilitas partai

Sarana Pengatur Konflik

Relevan dengan kondisi masyarakat yang pluralis, maka setiap partai politik harus mampu menampung dan menjadi penyalur berbagai nilai-nilai, keyakinan/kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Partai politik harus senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika yang berkembang seiring dengan perkembangan demokrasi, sehingga semakin mampu menampung berbagai kepentingan yang berbeda dan mensinkronkan dengan program-program partai, maka tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap partai akan mengalami peningkatan yang berarti.

DAFTAR RUJUKAN

- Amal, Ichlasul, (ed), 2012, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Huntington Samuel P. dan Joan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta , Jakarta.
- Maran, Rafael Raga, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, 2005, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang Pemilu dan Partai Politik 2008*, Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Penerbit Gradien Mediatama, Yogyakarta